

**PENGARUH PDRB, PARTISIPASI TENAGA KERJA, DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
BAGIAN BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

M. Readdy Darussalam

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
mreaddydarussalam523@gmail.com

Supaijo Supaijo

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
supaijo65@gmail.com

Alief Rakhman Setyanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
aliefrahmansetyanto@radenintan.ac.id

Abstract

This investigation seeks to ascertain the extent of the influence of GRDP, labor force participation, also education levels on income inequality in Western Indonesia from 2015 to 2025, using the perspective of Islamic economics as the primary analytical framework. The investigation's data came from Indonesian government reports published by the Central Statistics Agency (BPS), They were subsequently analyzed quantitatively using the Panel Data Regression technique with three requirements, including the Common Effect Model (CEM) test, Fixed Effects Model (FEM) test, and Random Effects Model (REM) test; the best model was selected using the Chou test, the Harsman test, and the Lagrange Multiplier (LM) test. Additionally, a Classical Assumptions test, specifically a Normality test, was conducted. The F-test, partial t-test, and coefficient of determination (R^2) test were then used for hypothesis testing. Considering the test findings, the model selected in this investigation is REM. The investigation's findings show the GRDP variable significantly also favorably affects income inequality, whereas Income inequality is not significantly impacted by labor force participation also educational level. From the perspective of Islamic economics, economic development focuses not just on economic growth, but also on the creation of justice and the equitable distribution of welfare among the people. Islam emphasizes the importance of fair income distribution through the principle of social justice also Islamic economic instruments, like sadaqah, zakat, and infaq, so that welfare can be enjoyed equally and excessive inequality does not arise in society.

Keywords: *GRDP, labor force participation, education level, income inequality, Islamic economics*

Abstrak

Studi ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi ini seberapa besar Pengaruh PDRB, Partisipasi Tenaga Kerja serta Tingkat Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan pada Indonesia Bagian Barat Tahun 2015-2025, dengan menjadikan perspektif ekonomi Islam sebagai landasan analisis utama. Data penelitian ini berasal dari laporan pemerintah Indonesia dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian diolah melalui pendekatan kuantitatif menggunakan metode Regresi Data Panel dengan 3 pensekatan, meliputi Uji Common Effect Model (CEM), Uji Fixed Model (FEM), Random Effect Model (REM), pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chouw, uji Hasuman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Selain itu dilakukan juga uji Asumsi Klasik berupa uji Normalitas. Kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji (F), uji parsial (t), serta uji koefisien determinasi (R²). Berlandaskan temuan pengujian, model yang terpilih pada studi ini ialah REM. Temuan studi memperlihatkan secara parsial variabel ketimpangan pendapatan terpengaruh positif nyata oleh PDRB, sedangkan variabel ketimpangan pendapatan tidak terpengaruh nyata oleh partisipasi tenaga kerja serta tingkat pendidikan. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi bukan sekedar berorientasi perkembangan ekonomi, namun serta terciptanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil melalui prinsip keadilan sosial serta instrumen ekonomi Islam, misalnya sedekah, zakat, serta infak agar kesejahteraan bisa dirasakan secara merata dan tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan dalam masyarakat.

Kata kunci: PDRB, partisipasi tenaga kerja, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, ekonomi Islam

Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan ekonomi yang banyak ditemui beragam bangsa, bangsa berkembang ataupun maju, melingkup Indonesia. Ketimpangan pendapatan dapat dipahami sebagai adanya perbedaan tingkat pemasukkan golongan warga yang punya pemasukkan besar bersama pemasukkan rendah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, persoalan ketimpangan pendapatan menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan nasional. Selaku bangsa berkembang, Indonesia menemui berbagai rintangan pembangunan, terutama tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua permasalahan tersebut berpotensi menghambat terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata. Dengan demikian, upaya pengurangan

ketimpangan pendapatan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta mendorong terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi.(Kusuma, Sarfiah, and Septiani 2019)

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat memunculkan berbagai dampak negatif, seperti kecemburuan sosial, meningkatnya disparitas ekonomi, hingga potensi konflik sosial di masyarakat. Perbedaan tingkat pembangunan antara wilayah maju dan tertinggal menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata. Oleh sebab itu, diperlukan konsep pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan capaian pembangunan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan semua elemen warga tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya. Pembangunan pada hakikatnya bukan sekedar mempunyai tujuan guna menunaikan keperluan dasar manusia, namun serta mesti mampu menaikkan mutu hidup warga dengan menyeluruh. Pada perkembangannya, paradigma pembangunan mulai menempatkan SDM sebagai fokus utama pembangunan, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dinilai lebih mampu menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Anshari, Azhar, and Ariusni 2018)

Ketimpangan yang besar bisa menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti naiknya jumlah orang miskin, rendahnya kemampuan bergerak sosial, serta melemahnya persatuan masyarakat. Selain itu, ketimpangan juga bisa menghambat kemajuan pembangunan ekonomi secara keseluruhan karena tidak semua wilayah memiliki kemampuan dan sumber daya yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, pembangunan yang merata menjadi hal penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan tersebut dengan kebijakan pembangunan yang mendukung keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan memperkuat bidang-bidang yang produktif pada wilayah terpencil, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang kerja yang merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mendorong tumbuhnya ekonomi yang baik, tetapi juga mampu menciptakan kemakmuran adil untuk semua golongan warga serta wilayah di Indonesia.(Dewi Rilla , Prayudi

Setiawan Prabowo 2024)

Di Indonesia bagian barat, isu tentang pemerataan pendapatan masih menjadi topik yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik, ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir cenderung tidak stabil atau mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan ekonomi antar provinsi di bagian barat Indonesia masih cukup besar dan belum sepenuhnya bisa dikurangi. Diduga, ketimpangan ini tidak hanya terjadi karena pertumbuhan ekonomi saja, namun serta terpengaruhi berbagai aspek lainnya, misalnya data penduduk, mutu tenaga kerja, dan kondisi pekerjaan di setiap daerah. Karena itu, masalah ketimpangan pendapatan di bagian barat Indonesia menjadi isu yang penting dan perlu segera dicari solusinya, baik melalui kebijakan nasional maupun program pembangunan yang lebih spesifik di tingkat daerah (Nilasari and Amelia 2022). dilihat dari data Gini Ratio dibawah ini:



Grafik 1 Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2015-2025

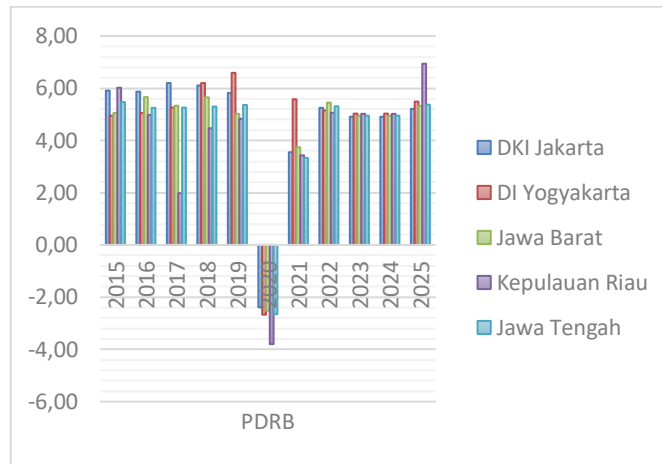
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan data Gini Ratio pada gambar di atas, bersumber BPS atau “Badan Pusat Statistik”, terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2025, tingkat ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah masih termasuk kategori sedang hingga tinggi. Nilainya berkisar antara 0,33 hingga 0,45. Di DKI Jakarta, Gini Ratio mencapai 0,431 pada 2015, turun ke 0,394 pada 2018–2019, kemudian naik lagi ke 0,431 pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 0,423 pada 2024 dan menjadi 0,441 pada 2025. DI Yogyakarta memiliki ketimpangan tertinggi, dengan Gini Ratio 0,433 pada 2015, naik ke 0,441 pada 2018, mencapai puncak 0,449 pada 2023, lalu turun menjadi 0,426 pada 2025. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan masih terus berlangsung. Jawa Barat memiliki Gini Ratio 0,415 pada 2015, turun ke 0,403 pada 2017, kembali naik menjadi 0,425 pada 2023, lalu sedikit menurun ke 0,416 pada 2025. Hal ini menunjukkan

adanya fluktuasi ketimpangan, namun tidak ada tren penurunan jangka panjang. Kepulauan Riau mencatat Gini Ratio 0,364 pada 2015, turun menjadi 0,330 pada 2018, lalu kembali naik menjadi 0,382 pada 2025. Sementara Jawa Tengah sebagai provinsi dengan ketimpangan terendah tetap berada pada rentang 0,361–0,382, dengan nilai 0,382 pada 2015, turun ke 0,361 pada 2019, lalu naik kembali menjadi 0,367 pada 2024 dan turun lagi menjadi 0,359 pada tahun 2025. Secara umum, tren fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah Indonesia bagian barat masih berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Adapun Salah satu faktor yang memiliki pengaruh erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan besarnya output ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang tinggi diinginkan bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Namun, apabila pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka hal ini justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan PDRB perlu diikuti dengan pemerataan distribusi hasil pembangunan agar dapat mengurangi ketimpangan. (Hendrawan and Yanto 2023).

Berdasarkan grafik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2015 hingga 2025, Bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi lima provinsi tersebut terus stabil sebelum pandemi, lalu mengalami penyusutan pada 2020, lalu perlahan pulih setelahnya. Pada 2015 hingga 2019, DKI Jakarta tumbuh antara 5,82 sampai 6,20 persen, DI Yogyakarta antara 4,95 sampai 6,59 persen, Jawa Barat antara 5,02 sampai 5,66 persen, Kepulauan Riau antara 4,47 sampai 6,02 persen, dan Jawa Tengah antara 5,25 sampai 5,47 persen, yang menunjukkan bahwa ekonomi daerah-daerah tersebut berkembang dengan baik dan stabil. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan tiba-tiba karena pandemi virus corona, di mana semua provinsi mengalami pertumbuhan negatif, yaitu DKI Jakarta -2,39%, DI Yogyakarta -2,67%, Jawa Barat -2,52%, Kepulauan Riau -3,80% yang merupakan penurunan paling dalam, dan Jawa Tengah -2,65%.



Grafik 2 Perkembangan PDRB Indonesia Tahun 2015-2025

Sumber: Bps Indonesia dan World Bank, 2025

Pada 2021 ekonomi mulai pulih dengan perkembangan positif, seperti DKI Jakarta mencapai 3,55%, DI Yogyakarta 5,58%, Jawa Barat 3,74%, Kepulauan Riau 3,43%, dan Jawa Tengah 3,33%. Kemudian kondisinya terus membaik hingga tahun 2022 sampai 2025. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,21% di DKI Jakarta, 5,49% di DI Yogyakarta, 5,32% di Jawa Barat, 6,94% di Kepulauan Riau (yang tertinggi), dan 5,37% di Jawa Tengah. Secara umum, data ini menunjukkan adanya siklus pertumbuhan yang dipengaruhi oleh gangguan luar pada tahun 2020 dan proses pemulihan ekonomi yang cukup kuat pada tahun-tahun berikutnya.

Tingkat pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang bemutu tinggi memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Daerah yang memiliki produktivitas tinggi cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan daerah dengan produktivitas rendah. Produktivitas berkaitan erat dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, tergantung pada sejauh mana masyarakat tersebut produktif. Namun, apabila kesempatan kerja masih terbatas pada sektor informal dengan upah rendah, maka kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan akan kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kesempatan kerja yang setara bagi tenaga kerja menjadi hal yang penting. dan tingkat pendapatan yang diperoleh (Nasywa Ardelia and Sishadiyati 2025). Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2015 hingga 2025, semua provinsi menunjukkan

tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi, tetapi ada perbedaan dalam cara perkembangannya. DKI Jakarta memiliki TPAK sebesar 66,39% pada 2015, kemudian kembali naik perlahan menjadi 65,21% pada 2023 dan turun menjadi 64,75% pada 2025. DI Yogyakarta terus mempertahankan tingkat TPAK tertinggi dibandingkan provinsi lain, dengan angka 68,38% pada 2015, lalu kembali naik hingga mencapai 74,08% pada 2023 dan 74,74% pada 2025, yang menunjukkan “keterlibatan penduduk usia kerja yang sangat tinggi dalam aktivitas ekonomi”. Jawa Barat memiliki TPAK yang relatif lebih rendah, yaitu 60,34% pada 2015, pada 2019 turun sedikit menjadi 64,53% pada 2020 akibat masa pandemi, lalu naik kembali hingga 66,49% pada 2023 dan 66,99% pada 2024. Kepulauan Riau menunjukkan TPAK sebesar 65,07% pada 2015, lalu naik tajam menjadi 68,68% pada 2023 dan sedikit turun menjadi 68,23% pada 2025. Sementara itu, Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 67,86% pada 2015 dan 73,74% pada 2024 hingga sampai di 74,36 pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin luasnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, peningkatan TPAK di sebagian besar provinsi memperlihatkan keadaan pasar tenaga kerja kian baik.

Ketimpangan pendapatan juga terberpengaruh oleh partisipasi tenaga kerja pendidikan, dengan tingkat pendidikan kian tinggi punya peluang kian besar guna mendapat pekerjaan dengan upah layak, sehingga dapat mempersempit kesenjangan pendapatan antarindividu. Melewati pendidikan, seseorang dapat menaikkan kecakapan juga kemampuan kerjanya, alhasil menyalurkan kontribusi langsung pada kenaikan pendapatan nasional.(Yolanda, Ahmad Soleh, Wiken Wafiaziza 2021). Berlandaskan data RLS atau “Rata-Rata Lama Sekolah” dari 2015 - 2024, semua provinsi menunjukkan tren peningkatan terus menerus, meskipun ada perbedaan dalam pencapaian antar daerah. DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi selama periode penelitian ini, yaitu 10,70 tahun pada 2015, lalu terus naik hingga mencapai 11,45 tahun pada 2023 dan 11,59 tahun pada 2025, yang menunjukkan kualitas pendidikan lebih baik dibanding provinsi lain. DI Yogyakarta mencatat RLS 9,00 tahun pada 2015, lalu terus naik hingga 9,83 tahun pada 2023 dan 10,20 tahun pada 2025, menunjukkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan menengah. Jawa Barat memiliki RLS yang relatif lebih rendah yaitu 7,86 tahun pada 2015, lalu terus naik hingga 8,83 tahun pada 2023 dan 9,14 tahun pada 2025, yang menunjukkan adanya

peningkatan kualitas pendidikan meskipun masih tertinggal dari provinsi lain. Kepulauan Riau mencatat RLS sebesar 9,65 tahun pada 2015, lalu terus naik hingga 10,41 tahun pada 2023 dan 10,72 tahun pada 2025, menunjukkan kemajuan pendidikan yang cukup signifikan. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki RLS terendah, yaitu 7,03 tahun pada 2015, dan mencapai 8,01 tahun pada 2023 serta 8,15 tahun pada 2025, yang menunjukkan perbaikan pendidikan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan.

Dalam pandangan Islam, penyebaran kekayaan bukan sekedar dilihat dari segi efisiensi ekonomi, namun serta sudut spiritual, etika serta sosial. Keadilan pada konteks Islam bukanlah bermakna semua orang memiliki kekayaan yang sama, tetapi menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang adil dalam memperoleh sumber daya ekonomi juga perlindungan dari ketimpangan serta kemiskinan yang terstruktur. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan supaya kekayaan bukan sekedar ditumpuk di tangan golongan orang kaya saja, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dari ayat tersebut bisa dipahami Islam menolak sistem yang mengakibatkan penumpukan harta pada sebuah kelompok, juga menyokong adanya perputaran kekayaan dengan merata pada semua lapisan golongan. Maka sebab itu, distribusi pemasukkan pada Islam diarahkan guna mewujudkan keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban sosial. Pada ekonomi Islam, satu di antara instrumen krusial pada pendistribusian kekayaan ialah zakat, yang wajib ditunaikan tiap Muslim yang sudah memenuhi syarat nisab serta haul. Zakat bukan sekedar dipersepsikan selaku wujud ibadah spiritual, namun serta berperan selaku instrumen fiskal yang berfungsi terhadap menyalurkan kekayaan golongan kaya pada golongan miskin (Muhammad Taufiq et al. 2025)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, ketidakmerataan penghasilan tidak hanya dipandang sebagai isu teknis ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, tanggung jawab moral, serta kesejahteraan masyarakat. Islam menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk

mencapai falah (kesejahteraan di dunia dan akhirat) serta memastikan setiap individu memperoleh hak ekonomi secara adil tanpa terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, kajian mengenai ketidakmerataan penghasilan di Wilayah Indonesia Bagian Barat pada tahun 2015–2025 bukan sekedar ditinjau berlandaskan parameter ekonomi, namun serta sejauh mana sistem ekonomi mampu mewujudkan keadilan distribusi sesuai prinsip-prinsip syariah.(Wiza 2023)

Islam menekankan bahwa ketidaksetaraan yang muncul tidak boleh dibiarkan meluas hingga menyebabkan kemiskinan sistemik. Al-Qur'an menegaskan "kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja", sehingga diperlukan mekanisme distribusi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, instrumen infak, zakat, wakaf, serta sedekah memiliki peran penting selaku sarana distribusi kekayaan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Instrumen-instrumen tersebut menjadi pelengkap kebijakan ekonomi dalam menekan ketimpangan yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme pasar.(Tasriani et al. 2025)

Maka sebab itu, pada konteks Ekonomi Islam, pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, keterlibatan angkatan kerja, serta tingkat pendidikan terhadap ketidaksetaraan pendapatan tidak hanya dianalisis dari hubungan statistik semata, tetapi juga dinilai dari perspektif keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Barat tidak hanya menghasilkan peningkatan output, tetapi juga mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.(Anjani, Ekawati, and Satriawan 2025).

Kajian Teori

1. Teori Kuznet

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu topik sentral dalam penelitian perpajakan yang telah banyak dikaji dari berbagai perspektif teoritis. Salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan adalah compliance theory yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang berpendapat bahwa keputusan seorang individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan pada dasarnya merupakan keputusan

ekonomi rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari kepatuhan versus ketidakpatuhan. Model ini kemudian diperluas oleh Kirchler (2007) yang memperkenalkan konsep *slippery slope framework*, yang menekankan bahwa kepatuhan dapat bersifat sukarela (*voluntary compliance*) atau terpaksa (*enforced compliance*), tergantung pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan dan kekuatan penegakan hukum.

Teori Mengatakan bahwa awalnya, ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin merata. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini dan kriteria Bank Dunia. Nilai rasio gini berkisar antara nol dan satu. Jika rasio gini sama dengan nol, berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap kelompok penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Dalam tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan semakin besar karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor industri dan kota, sementara masyarakat pedesaan masih berpenghasilan rendah. Namun, seiring berkembangnya ekonomi dan semakin banyaknya peluang kerja di sektor modern, ketimpangan pendapatan mencapai puncaknya, lalu mulai berkurang. Penurunan ini terjadi karena semakin banyaknya akses masyarakat terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak selalu meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, tetapi akan menurun ketika pembangunan mencapai tahap yang lebih matang dan hasil pertumbuhan dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (P. Todaro, Stephen C. Smith 2006)

2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dasarnya ialah perbedaan pemasukkan, diciptakan warga alhasil menimbulkan kesenjangan pemasukkan mencolok. Keadaan ini mengakibatkan golongan kaya mewujud kian kaya, sementara golongan miskin kian tertinggal. Pada hal ini, distribusi pemasukkan merefleksikan tingkat pemerataan ataupun ketimpangan hasil pembangunan sebuah bangsa di kalangan penduduknya. Guna menilai tingkat pemerataan distribusi pemasukkan ini, ada sejumlah tolok ukur ataupun parameter yang dipakai, yakni

gini ratio serta kurva Lorenz.(Janah 2022) Menurut Teori Mankiw, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa ekonomi sebuah bangsa bisa menciptakan banyak produk serta layanan. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Namun, Mankiw menekankan bahwa PDB memiliki kekurangan, yaitu tidak mencerminkan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada Masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Karena itu, meskipun PDB sering digunakan sebagai acuan utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan, nilai PDB tidak selalu mencerminkan seberapa merata kesejahteraan sosial di sebuah negara.(Daengs 2025)

3. PDRB

PDRB atau “Produk Domestik Regional Bruto” dasarnya ialah total nilai produk serta layanan jasa yang diciptakan pada sebuah wilayah ataupun regional dengan sebuah kurun waktu, umumnya satu tahun. Besarnya nilai PDRB kerap memperlihatkan besarnya tingkat perkembangan ekonomi sebuah wilayah. Berlandaskan BPS atau “Badan Pusat Statistik”, “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah”. Pada implementasinya, PDRB atas dasar harga berlaku memvisualisasikan nilai tambah produk serta layanan yang dihitung memakai harga tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan nilai tambah produk serta layanan yang dihitung berlandaskan harga pada tahun tertentu. (Dama, Lopian, and Sumual 2016) Teori PDRB yang digagas Robert M. Solow pada tahun 1956 menyatakan bahwa perbedaan tingkat investasi dan tingkat teknologi antar daerah bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang, daerah yang tertinggal masih bisa mengejar daerah yang lebih maju melalui proses konvergensi ekonomi.(Wendy dkk 2024)

4. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah cara mengukur seberapa besar penduduk yang sudah berusia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang siap untuk menghasilkan barang dan jasa. Informasi tentang angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin dan usia memberikan gambaran mengenai bagaimana penduduk yang aktif secara ekonomi

terdistribusi. Secara umum, TPAK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan di suatu negara atau wilayah, serta menunjukkan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung produksi barang dan jasa dalam perekonomian tersebut. (Ardhiyanti 2025) Teori Produktivitas Marginal menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada buruh ditentukan oleh berapa banyak kerja tambahan yang mereka lakukan, yaitu hasil tambahan yang dihasilkan oleh satu orang buruh tambahan. Artinya, buruh akan diberi upah sesuai dengan seberapa besar kontribusinya terhadap produksi. Semakin tinggi produktivitas buruh, maka semakin besar upah yang diberikan. Pekerja dengan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih besar sehingga memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan pekerja dengan produktivitas rendah akan menerima upah yang lebih kecil. Kondisi ini apabila terjadi secara luas dan terus-menerus dapat memperlebar kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. (Aryntika dkk 2024)

5. Tingkat Pendidikan

Berlandaskan studi Hanushek dan Woessmann (2012), kualitas pendidikan adalah komponen penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan mendorong inovasi. Dalam hal ini, negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang kuat cenderung menemui perkembangan ekonomi kian pesat daripada bangsa-bangsa dengan sistem pendidikan rendah. Pendidikan juga dapat mengurangi kemiskinan. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup karena orang bisa mendapat kecakapan juga wawasan yang dibutuhkan guna mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Bank Dunia (2018), setiap tambahan satu tahun pendidikan formal bagi penduduk suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara hingga 0,37%. (Husein dkk 2024) Teori Human Capital ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia bisa menjadi aset yang produktif, dan nilainya bisa ditingkatkan melalui berbagai bentuk investasi, seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Schultz berpendapat bahwa investasi pada manusia memiliki banyak faedah ekonomi, untuk perorangan ataupun bagi warga. Dasar teori ini adalah asumsi bahwa setiap orang berusaha berpikir rasional dan ingin memperoleh keuntungan maksimal. Pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta penghasilan seseorang. Keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan juga menjadi salah satu dasar penting dari teori ini. Tujuan inti teori ini ialah menaikkan

produktivitas tenaga kerja dengan cara melakukan investasi pada modal manusia, akhirnya menyalurkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Afdhal Chatra 2015)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kuantitatif, yakni sebuah pendekatan studi yang berorientasi pengujian hipotesis melewati penilaian variabel-variabel studi dengan wujud angka. Berikutnya, data dianalisa memakai metode statistik juga pemodelan, terangkai terstruktur. Pendekatan ini digunakan karena penelitian mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), partisipasi tenaga kerja, serta tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. (Sugiyono 2013). Jenis data yang dipakai pada studi ini ialah data sekunder dalam bentuk data time series. Data time series dalam studi ini menggunakan 11 tahun terakhir yakni pada periode 2015-2025.

Metode analisa yang dipakai pada studi ini ialah regresi data panel, yakni kolaborasi data cross section dengan data time series (runtun waktu). Pendekatan ini diambil sebab bisa menghadirkan dimensi analisa kian komprehensif disandingkan pemakaian data cross section ataupun time series dengan terpisah. Pemakaian data panel pada sebuah observasi punya sejumlah keunggulan, yakni bisa menyajikan jumlah data kian banyak sebab mengkolaborasikan 2 jenis data, alhasil menciptakan degree of freedom kian besar. Kenaikan jumlah observasi ini memungkinkan estimasi parameter model dilaksanakan dengan tingkat presisi kian baik. Pengkolaborasikan informasi data time series serta cross section bisa menyokong menuntaskan permasalahan yang timbul sebab adanya variabel yang dihilangkan (omitted variable). (Muhamad 2008) Selaku instrument pada pengolahan data, studi ini memakai Eviews 13. Persamaan dasar regresi data panel secara umum ialah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Pendapatan/Tingkat Gini Ratio

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Variabel Independen

X1 = Produk Domestik Regional Bruto

X2 = Tenaga Kerja

X3 = Rata-rata Lama Sekolah

E = Koefisien *Error*

i = Jumlah Provinsi di Wilayah Indoensia Bagian Barat yaitu sebanyak 5 Provinsi

t = periode waktu penelitian yaitu dari tahun 2015- 2025.

Analisa data pada studi ini memakai tiga pendekatan model data panel, yakni CEM atau “Common Effect Model”, FEM atau “Fixed Effect Model”, serta REM atau “Random Effect Model”. CEM adalah regresi data panel yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan khusus antara masing-masing individu atau periode waktu., sedangkan FEM menganggap tiap individu punya angka mulai atau “intersep” berbeda, namun kemiringan atau “slope” antara individu sama. Sementara itu, REM atau “Random Effect Model” dasarnya dipakai guna mengestimasi data panel saat variabel gangguan dimungkinkan berkorelasi, antarwaktu ataupun antarindividu. (Erric dkk 2024) Penetapan model terbaik dilaksanakan melewati sejumlah tahap pengujian, yakni Pengujian Chow guna menetapkan pilihan CEM ataupun FEM, Pengujian Hausman guna menetapkan FEM ataupun REM, Pengujian LM atau “Lagrange Multiplier”, dipakai guna menyandingkan CEM ataupun REM. (Jihad Lukis Panjaya 2021) Selanjutnya, uji hipotesis dilaksanakan melewati Uji t guna mengidentifikasi pengaruh secara parsial, Uji F guna meninjau pengaruh secara simultan, koefisien determinasi (R^2) dipakai guna menilai kapabilitas variabel independen terhadap memvisualisasikan variabel dependen. (Helena 2022) Selain itu, dilaksanakan pengujian asumsi klasik guna menjamin model memenuhi kriteria BLUE atau “Best Linear Unbiased Estimator”. Salah satunya adalah pengujian normalitas yang dipakai guna mengidentifikasi apakah data residual berdistribusi normal, di mana data dianggap normal bila nilai signifikansi $> 0,05$. (Madum, Ida Faridah, Septian Fiktor Riyantoro Dkk 2025)

Hasil Penelitian

1. Uji Regresi Data Panel

a. Uji Common Effect Model (CEM)

Tahapan awal dilaksanakan mengolah data memakai pendekatan CEM atau “*Common Effect Model*” secara sederhana, yakni dengan mengkolaborasikan semua data time series serta *cross section*, lalu model diestimasi melewati metode OLS atau “*Ordinary Least Square*”. Temuan pengolahan data memakai model CEM ialah:

Tabel 1 Uji Common Effect Model (CEM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	0.200978	2.140222	0.0371
PDRB	0.002344	1.258927	0.2138
TPAK	0.001843	1.548231	0.1278
RLS	0.006371	1.762434	0.084
R-squared		0.1119	
F-Statistik		2.141998	
Signifikansi (F-Stat)		0.106356	

Sumber: *Eviews 13*

b. Fixed Effect Model (FEM)

Langkah kedua adalah melakukan pengolahan data dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) sebagai perbandingan dengan metode Common Effect Model. Hasil dari proses pengolahan menggunakan model Fixed Effect adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Fixed effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	0.313676	6.193548	0,0000
PDRB	0.001313	2.107683	0.0404
TPAK	0.000312	0.304814	0.7619
RLS	0.005853	0.983964	0.3302
R-squared	0.911064		
F-Statistik	68.78178		
Signifikansi (F-Stat)	0,000000		

Sumber: *Eviews 13*

c. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui model Fixed Effect atau Random Effect yang paling sesuai digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji ini mengecek apakah ada perbedaan intersep atau struktur regresi antar keompok Variabel.

Hipotesa:

- 1) H_0 : Random Effect Model (REM)
- 2) H_a : Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 3 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	105.584044 (4,47)		0.0000
Cross-section Chi-square	126.564444 4		0.0000

Sumber: *Eviews 13*

Berlandaskan temuan Pengujian Chow, nilai probabilitas Cross-section F $0,0000 <$ tingkat signifikansi $0,05$. Nilai probabilitas Cross-section Chi-square $0,0000 < 0,05$, H_0 ditolak serta H_a diterima, alhasil model yang dinilai tepat guna dipakai pada studi ini ialah FEM atau “Fixed Effect Model”.

Berdasarkan temuan pengujian Chow yang memperlihatkan model yang kian tepat ialah FEM atau “Fixed Effect Model”, Lalu dilaksanakan pengujian Housman guna menyandingkan FEM atau “Fixed Effect Model” dengan REM atau “Random Effect Model” yang lebih selaras dipakai pada studi guna memastikan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Sebelum dilakukan uji hausman, dilakukan terlebih dahulu regresi Random Effect Model.

d. Random Effect Model (REM)

Setelah melakukan uji Chow, data kemudian diproses menggunakan metode pendekatan *Random Effect Model* (REM) untuk dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengolahan menggunakan *Random Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Random effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	0.309236	6.011309	0,0000
PDRB	0.001319	2.124015	0.0385
TPAK	0.000451	0.502694	0.6173
RLS	0.005322	1.091176	0.2803
R-squared	0.127611		
F-Statistik	2.48672		
Signifikansi (F-Stat)	0.070965		

Sumber: *Eviews 13*

e. Uji Housman

Diimplementasikan guna menentukan model mana yang lebih tepat dipakai, yaitu model FEM atau model REM.

Hipotesa:

- 1) H_0 : Random Effect Model (REM)
- 2) H_a : Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 5 Uji Housman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.594615	3	0.1331

Sumber: Eviews 13

Berlandaskan temuan pengujian Hausman, didapat nilai probabilitas $0,1331 > 0,05$. Maka sebab itu, hipotesis 0 diterima serta hipotesis a ditolak, sehingga model yang paling selaras guna dipakai pada studi ini alah REM. Maka selanjutnya dilakukan uji LM guna menetapkan apakah model CEM atau “Common Effect Model” ataupun REM atau “Random Effect Model” yang kian selaras dipakai pada studi.

f. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Diimplementasikan guna menentukan pilihan apakah model lebih baik dari pada metode OLS. Untuk itu dipakai pengujian LM atau “Lagrange Multiplier”, digagas Breusch-Pagan. Kriteria Uji LM ditentukan nilai distribusi Chi-Squares berdasarkan perbandingan antara Chi-Squares hitung serta Chi-Squares tabel. Adapun derajat kebebasan atau “degree of freedom, df” ditentukan jumlah variabel independen.

Hipotesa:

- 1) H_0 : Common Effect Model (CEM)
- 2) H_a : Random Effect Model (REM)

Tabel 7 Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	208.6091 (0.0000)	4.182265 (0.0408)	212.7913 (0.0000)

Sumber: Eviews 13

Berlandaskan temuan Pengujian LM dengan metode Breusch Pagan, didapat nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Maka sebab itu, H_0 ditolak serta H_1 diterima, alhasil model yang lebih tepat dipakai ialah REM atau “Random Effect Model”.

2. Hasil Estimasi Regresi Random Effect Model (REM)

Berlandaskan pengujian chow, pengujian Housman serta pengujian LM, model regresi data panel yang tepat guna dipakai pada studi ini ialah REM “Random Effect Model”. Temuan regresi memakai REM atau “Random Effect Model” ialah:

Tabel 8 Hasil Uji Random effect Model(REM)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikansi
C	0.309236	6.011309	0,0000
PDRB	0.001319	2.124015	0.0385
TPAK	0.000451	0.502694	0.6173
RLS	0.005322	1.091176	0.2803
R-squared	0.127611		
F-statistik	2.48672		
Signifikansi (F-statistik)	0.070965		

Sumber: Eviews 13

$$GR=0.309236 + 0.001319 \cdot PDRB_{it} + 0.000451 \cdot TPAK_{it} + 0.005322 \cdot RLS_{it}$$

Berlandaskan persamaan regresi sebelumnya, bisa dijelaskan:

- Berlandaskan persamaan sebelumnya, besarnya konstanta yakni 0.309236. Memperlihatkan bila variabel independen (PDRB, TPAK, serta RLS) punya nilai 0, tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 0.309236.
- Nilai koefisien PDRB 0.001319 serta bertanda positif. Memperlihatkan tiap naiknya PDRB 1%, ketimpangan pendapatan meningkat 0.001319.
- Nilai koefisien TPAK 0.000451 dan bertanda positif positif. Memperlihatkan tiap naiknya TPAK 1%, ketimpangan pendapatan meningkat 0.000451.
- Nilai koefisien RLS 0.005322 serta bertanda positif. Memperlihatkan tiap naiknya rata-rata lama sekolah 1%, ketimpangan pendapatan meningkat 0.005322.

3. Pengujian Hipotesis

- Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9 Uji Parsial (t)

Variable	t-Statistik	t-Tabel	Prob	Keterangan
PDRB	2.124015	2.007	0.0385	Ha Diterima
TPAK	0.502694	2.007	0.6173	H0 Ditolak
RLS	1.091176	2.007	0.2803	H0 Ditolak

Sumber: Eviews 13

Berlandaskan temuan uji t, diperlihatkan dalam tabel sebelumnya, didapat nilai t-statistik PDRB 2.124015 berarah positif, nilai signifikansi PDRB 0.0385 <0,05. Berlandaskan hasil di atas memperlihatkan Ha Diterima serta Menolak H0. Bisa ditarik simpulan PDRB memberi pengaruh positif nyata pada ketimpangan pendapat. Menurut temuan uji t nilai signifikansi TPAK adalah 0.6173 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berlandaskan temuan ini, bisa ditarik simpulan Ha ditolak serta H0 diterima. Dapat disimpulkan ketimpangan pendapatan terpengaruh positif, namun tidak nyata oleh TPAK. Berdasarkan temuan uji t nilai signifikansi RLS 0.2803, menunjukkan angka > 0,05. Berlandaskan temuan ini, bisa ditarik simpulan Ha ditolak serta H0 diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ketimpangan pendapat terpengaruh positif, meski tidak nyata oleh RLS atau “Rata-rata Lama Sekolah”.

b. Uji F

Diimplementasikan guna mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh secara bersamaan dari beberapa variabel bebas pada variabel terikat. Tingkat kepercayaan yang dipakai ialah 0,5 (5%), bila nilai signifikansi $F < 0,05$ bisa ditarik simpulan variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya. Temuan Uji F ialah:

Tabel 11 Uji Simultan (f)

F-Statistik	F-Tabel	Prob.	Keterangan
2.48672	2,79	0.070965	H0 Diterima

Sumber: Eviews 13

Dari tabel yang disajikan, didapat nilai F hitung atau F-statistik bernilai 2.48672, nilai signifikansi mencapai 0.070965, menunjukkan > 0,05, alhasil Ha ditolak serta Ho diterima. Dengan begitu, bisa ditarik simpulan variabel PDRB, TPAK, dan RLS secara simultan tidak memberikan pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapat.

c. Uji Koefisien R2

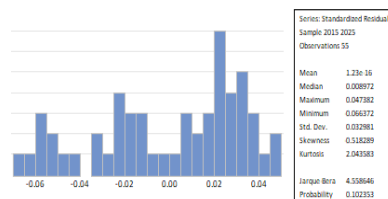
Uji koefisien determinasi (R-square) digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan analisis regresi dengan pendekatan Random Effect, nilai R-squared yang diperoleh adalah 0.127611. Ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yakni PDRB, TPAK, dan RLS, secara

kolektif dapat menerangkan variasi pada ketimpangan pendapat sebesar 12,76%, sementara 87,24% sisanya dipengaruhi oleh elemen lain di luar model yang diteliti. Selain itu, nilai Adjusted R-squared yang mencapai 0.076294 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen menjadi hanya 7,63%. Nilai ini termasuk rendah, sehingga bisa disimpulkan bahwa efektivitas variabel PDRB, TPAK, dan RLS dalam menerangkan variasi ketimpangan pendapat masih cukup terbatas.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Diimplementasikan guna mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi dengan normal ataupun tidak. Model regresi baik ditandai dengan residual berdistribusi normal. Landasan penetapan putusnya ialah: bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Jika hasil uji menunjukkan distribusi normal, maka analisis selanjutnya dapat dilakukan. Temuan Uji Normalitas ialah:



Grafik 3 Uji Asumsi Klasik (uji Normalitas)

Sumber: *Output Eviews, 2026*

Pengujian ini memanfaatkan teknik Jarque-Bera. Temuan dari uji memperlihatkan angka probabilitas $0,102353 > 0,05$, alhasil bisa ditarik simpulan residual data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi kriteria normalitas. Studi ini tidak menjalankan uji asumsi klasik lainnya secara menyeluruh karena model yang diterapkan ialah regresi data panel pendekatan REM atau “Random Effect Model”, di mana pengujian terhadap normalitas residual sudah dianggap memadai untuk memenuhi asumsi dasar dalam analisis.

Pembahasan

1. Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berlandaskan temuan uji t, didapat nilai t-statistik PDRB 2.124015 berarah positif, nilai signifikansi PDRB 0.0385, berarti $<0,05$. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki tingkat kebermaknaan statistik yang memadai dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan. Berlandaskan temuan itu memperlihatkan H_a Diterima serta H_0 Ditolak. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan memperoleh dukungan empiris dari hasil pengujian statistik. Bisa ditarik simpulan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah atau antarkelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan Teori yang menyatakan PDRB berpengaruh Positif dan signifikan, hal ini terjadi karena karena pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak berlangsung secara merata, dimana daerah dengan tingkat investasi, infrastruktur, dan teknologi yang lebih maju memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan daerah yang tertinggal, sehingga kesenjangan pendapatan semakin melebar.

Selaras Teori Neoklasik, digagas Robert M. Solow, mengungkapkan pada tahap awal perkembangan ekonomi, peningkatan output atau pendapatan daerah dapat memunculkan ketimpangan akibat perbedaan akumulasi modal, investasi, dan teknologi antar wilayah. Daerah yang memiliki kemampuan produksi dan investasi lebih tinggi akan berkembang kian pesat disandingkan wilayah lainnya, alhasil perkembangan ekonomi belum mampu dirasakan dengan merata oleh semua golongan. Dengan demikian, peningkatan PDRB pada studi ini terbukti memberikan pengaruh positif nyata pada ketimpangan pendapatan. (Rizkianda and Wiguna 2022) Memperlihatkan perkembangan ekonomi yang terefleksi melalui kenaikan PDRB belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Peningkatan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi dalam sebuah daerah atau kelompok dengan akses modal, teknologi, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, perkembangan ekonomi tinggi justru diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pemasukkan antara masyarakat maupun antar daerah. (Adipathy and Armunanto 2025) Temuan studi ini mendukung temuan studi Dian Nora et.al (2022) menjabarkan "PDRB

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan”.(Nora Herlina et al. 2022).

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berlandaskan temuan uji t yang tertera dalam table diatas, didapat nilai t-statistik TPAK yang mencapai 0.502694 berarah positif, nilai signifikansi TPAK adalah $0.6173 > 0,05$. Temuan itu memperlihatkan H_a ditolak serta H_0 diterima. Bisa ditarik simpulan TPAK memiliki pengaruh positif, tidak nyata pada Ketimpangan Pendapatan. Temuan positif ini sejalan dengan teori, karena peningkatan partisipasi tenaga kerja dapat berdampak pada perubahan distribusi pendapatan. Namun, karena tidak signifikan, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk membuktikan bahwa peningkatan TPAK benar-benar memengaruhi ketimpangan.(Masruri 2016)

Sejalan dengan Teori Produktivitas Marginal menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara TPAK atau “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” dengan ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa kenaikan TPAK sering kali disertai dengan peningkatan ketidakmerataan pendapatan. Ini mengisyaratkan bahwa bertambahnya jumlah pekerja yang terlibat di pasar kerja tidak selalu berkaitan dengan pemerataan pendapatan, sebab masih terdapat perbedaan dalam hal produktivitas dan gaji di antara para pekerja. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan signifikansi, di mana peningkatan TPAK tidak memberi pengaruh secara langsung dan nyata pada ketidakmerataan pendapatan. Diakibatkan fakta bahwa tidak semua pekerja yang bergabung dalam pasar kerja memiliki produktivitas yang serupa, sehingga gaji yang diterima mereka pun bervariasi. Di samping itu, sesuai dengan Teori Produktivitas Marginal, gaji ditentukan oleh produktivitas marginal dari pekerja. Jika peningkatan produktivitas dari pekerja relatif rendah, maka tambahan jumlah tenaga kerja tidak akan berdampak besar pada distribusi pendapatan. Meskipun ada pengaruh positif antara TPAK dan ketidakmerataan pendapatan, pengaruh itu tidak signifikan akibat adanya faktor lain seperti kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, serta struktur pasar tenaga kerja yang juga mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.(Rismaya and Yusuf 2026) Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Masuri menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.(Masruri 2016)

3. Pengaruh RLS Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan temuan dari uji t yang tertera dalam tabel sebelumnya, didapat t-statistik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1.091176 dengan arah positif, nilai signifikansi RLS 0.2803, menunjukkan angka $> 0,05$. Berlandaskan temuan itu, bisa ditarik simpulan H_a ditolak serta H_0 diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ketimpangan pendapat terpengaruh positif, meski tidak nyata oleh RLS atau “Rata-rata Lama Sekolah”. Hasil ini tidak mendukung Teori yang berargumen bahwa peningkatan tingkat pendidikan harusnya bisa menurunkan ketimpangan dalam distribusi pemasukkan. Dalam penelitian ini, RLS atau “Rata-rata Lama Sekolah” malah memperlihatkan hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, walaupun dampak tersebut tidak signifikan. (Romadona et al. 2024)

Dalam Teori Modal Manusia pada penelitian ini menunjukkan Peningkatan dalam bidang pendidikan belum berhasil menciptakan efek yang merata pada distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun teori menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi yang dapat memajukan keterampilan, produktivitas, dan penghasilan individu, kenyataannya kenaikan rata-rata tahun sekolah tidak selalu diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kualitas pendidikan, peluang kerja, serta kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap pekerja terdidik yang bervariasi di berbagai wilayah. Akibatnya, pendidikan hanya memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok tertentu, sehingga dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan menjadi kurang signifikan. Dengan begitu, temuan penelitian ini menandakan investasi pada pengembangan SDM melewati pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. (Abdullah 2014) Walaupun pendidikan meningkat, tidak semua individu mendapatkan keuntungan ekonomi yang sama, tergantung pada seberapa berkualitas pendidikan yang diterima, relevansi keterampilan dengan tuntutan pasar kerja, serta ketersediaan peluang kerja. Pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan akibat faktor-faktor lain, misalnya mutu pendidikan, peluang bekerja, serta perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi yang juga berperan dalam mempengaruhi tingkat ketidakmerataan pendapatan. (Hendrizal et al. 2024) Temuan studi ini mendukung hasil studi Sri Indriyani, Syarwani Canon, dan Devi Oktaviani Bauty, menjabarkan “RLS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan”. (S. Dai, Canon, and Bauty 2023)

4. Pengaruh PDRB, Partisipasi Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Wilayah Indonesia Barat 2015-2025 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara simultan Variabel PDRB, Tenaga Kerja, dan Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh tidak nyata pada ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat tahun 2015-2025 di mana kontribusinya sebesar 12,76%, sementara 87,24% sisanya oleh variabel lain di luar model. Ketidaksignifikan ini mengindikasikan peningkatan dalam ketiga variabel tersebut belum mampu secara nyata memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat pendidikan, serta bertambahnya partisipasi angkatan kerja tidak secara otomatis berdampak pada pemerataan pendapatan. Kondisi ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Peningkatan PDRB cenderung hanya terpusat pada sektor atau kelompok tertentu sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, meskipun tingkat pendidikan meningkat, tidak semua individu memperoleh keuntungan ekonomi yang sama karena dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, peningkatan TPAK juga tidak menjamin pemerataan pendapatan, karena perbedaan produktivitas tenaga kerja menyebabkan variasi tingkat upah yang diterima, sesuai dengan Teori Produktivitas Marginal yang menyatakan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja. (Manihuruk 2026)

Menurut teori Kuznets, pada fase awal perkembangan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita sering kali disertai dengan peningkatan ketidakseimbangan pendapatan, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahap pembangunan yang lebih canggih (membentuk kurva U terbalik). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa kepada pemerataan pendapatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, kondisi yang tidak signifikan dalam penelitian kali ini menunjukkan bahwa area yang diteliti mungkin masih berada dalam tahap awal atau fase transisi pembangunan, di mana keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan dalam pendidikan, dan keterlibatan angkatan kerja belum tersebar dengan merata.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel Produk PDRB atau “Domestik Regional Bruto”, TPAK atau “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja”, serta RLS atau “Rata-rata Lama Sekolah” tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan di wilayah Indonesia Barat. Secara statistik, ketiga variabel tersebut tidak mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan dalam model yang diuji. Fenomena ini bertentangan dengan studi Lorentino Togar Laut, Arinda Sita Putri, dan Yustirania Septiani, yang menemukan pengaruh signifikan PDRB per kapita dan TPAK terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2008–2018. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui dijelaskan melalui teori Kuznets yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung memengaruhi pemerataan pendapatan. Pada tahap tertentu, peningkatan ekonomi, pendidikan, maupun partisipasi kerja belum tentu mampu menurunkan ketimpangan apabila manfaat pembangunan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Sedangkan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriyani, Syarwani Canon dan Devi Oktaviani Bauty menunjukkan hasil variable Rata-Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, artinya setiap peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di KBI dan KTI.(S. Dai, Canon, and Bauty 2023)

Hal ini dikarenakan karakteristik wilayah berbeda secara mendasar. Pulau Jawa menonjol dengan ekonomi maju berbasis industri dan jasa, didukung infrastruktur merata, sehingga perubahan PDRB dan TPAK cepat memengaruhi distribusi pendapatan. Sebaliknya, wilayah Indonesia Barat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, di mana pertumbuhan PDRB sering terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sesuai teori ekonomi pembangunan yang menyatakan pertumbuhan tidak selalu inklusif.(Lailatussubha and Nazer 2025) Lalu, TPAK tidak signifikan karena dominasi sektor informal di pasar tenaga kerja. Peningkatan partisipasi tidak diikuti kualitas pekerjaan atau upah layak, sehingga distribusi pendapatan tetap timpang sejalan dengan studi empiris di Indonesia pada wilayah berinformalitas tinggi. RLS tidak berpengaruh karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan lama sekolah belum meningkatkan kualitas SDM atau peluang kerja secara merata, ditambah ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. (Artikel 2020)

Secara keseluruhan, hasil ini valid secara ilmiah, menekankan bahwa ketimpangan di Indonesia Barat lebih dipicu faktor struktural kompleks. Kebijakan pemerintah harus menargetkan pemerataan pembangunan, kualitas pekerjaan, dan akses ekonomi yang adil, selain pertumbuhan, TPAK, dan pendidikan.(Valentina, Alfiyan, and Anshori 2024)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau peningkatan indikator sosial, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara merata. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi melalui mekanisme keadilan sosial serta instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Dengan demikian, pengaruh simultan ketiga variabel terhadap ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan pemerataan agar tujuan kesejahteraan yang merata (falah) dapat tercapai dan tidak terjadi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. (Mubarak 2025)

Kesimpulan

Pemahaman zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim ($\beta = 0,412$; $p < 0,001$). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Sedangkan tingkat pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme integrasi zakat-pajak masih tergolong rendah hingga sedang, dengan nilai rata-rata hanya 2,89 dari skala 5. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar yang perlu segera diatasi melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif dan terstruktur. Lalu, model penelitian secara keseluruhan mampu menjelaskan 32,8 persen variasi dalam kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman zakat sebagai pengurang PKP merupakan faktor yang cukup substansial dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Hasil penelitian ini mendukung relevansi pendekatan ekonomi syariah dalam pengembangan kebijakan perpajakan Indonesia, terutama dalam konteks mayoritas penduduk Muslim. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal, termasuk melalui mekanisme pengurangan zakat dari PKP, terbukti dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Saran

Beberapa rekomendasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas program sosialisasi mengenai

mekanisme pengurangan zakat dari PKP. Program sosialisasi ini hendaknya dirancang secara spesifik untuk menysasar wajib pajak Muslim dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka. Kedua, kolaborasi institusional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BAZNAS dan LAZ perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal dan terstruktur. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah program pendampingan bersama di mana petugas BAZNAS/LAZ turut memberikan edukasi kepada wajib pajak Muslim tentang implikasi perpajakan dari pembayaran zakat mereka. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperluas cakupan pengurangan zakat dari sekadar pengurang PKP menjadi kredit pajak (tax credit) secara penuh, sehingga manfaat insentif fiskal bagi wajib pajak Muslim menjadi lebih substantif dan lebih mendorong kepatuhan. Kebijakan serupa telah berhasil diterapkan di Malaysia dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Keempat, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis sampel, mengeksplorasi variabel moderator seperti tingkat religiusitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta menggunakan metode penelitian campuran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme psikologis yang menghubungkan pemahaman zakat dengan kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Statistik zakat nasional 2022*. BAZNAS Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. BPS Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi pembangunan syariah* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hamid, M. A., Sanusi, Z. M., Rodzi, M. N. H., & Abdullah, N. (2022). Zakat tax rebate and tax compliance among Muslim taxpayers: Evidence from Malaysia. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 10(1), 15-28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v10i1.7862>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2022). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakat. *International Journal of Zakat*, 7(1), 37-52. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.309>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota keuangan beserta APBN tahun anggaran 2024*. Kementerian Keuangan RI.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mustaqiem, A., Wahyuningsih, T., & Dewi, R. (2023). Pengaruh theory of planned behavior terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 112-128. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7154>
- Nurhayati, S., & Wahyuni, S. (2022). Pemahaman regulasi zakat sebagai pengurang PKP dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 45-62. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i01.p04>
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2021). The evolution and concept of tax compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 15(3), 557-563.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Riswanto, A., & Sulistiani, R. (2023). Analisis integrasi zakat dan pajak penghasilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 89-110. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.27891>
- Suryani, H., & Hendryadi, H. (2021). Religiusitas, sikap, norma subjektif, dan niat kepatuhan zakat: Telaah pada muzakki profesional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 211-230. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.28912>
- Wahab, N. A., & Abdul Rahman, A. R. (2021). Efficiency of zakat institutions and its determinants. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 629-645. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2020-0100>.